



Upayakan Masuk APBD Perubahan

Anggaran Pemkot untuk Penanganan Pandemi Covid-19

JOGJA, Radar Jogja - Masa tanggap darurat virus korona (Covid-19) di DIY diperpanjang hingga 31 Agustus. Pemerintah kota Jogja mendukung perpanjangan masa tanggap darurat, demi kemudahan penyaluran anggaran penanganan Covid-19.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poereadi (HP) mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 ada dua model yang dilakukan yakni realokasi *refocusing* dan mengupayakan di APBD per-

ubahan. Dalam APBD perubahan, beberapa program yang akan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 diupayakan bisa masuk pada akomodasi realokasi *refocusing* dalam APBD perubahan. "Karena kalau anggaran tidak fleksibel kami khawatir tidak bisa menangani kasus," jelasnya.

Selama ini, Pemkot Jogja mengalokasikan realokasi *refocusing* sebesar Rp 174 miliar dalam biaya tak terduga untuk penanganan Covid-19. Jumlah tersebut tetap akan didorong agar bisa diakomodir pada APBD perubahan. Ini agar Pemkot tetap mempunyai kemampuan ketika ada kasus-kasus yang berkembang. "Karena



RADAR JOGJA FILE

Haryadi Suyuti

kasus yang kami tangani belum selesai masih trus berjalan dan fluktuatif. Kalau *nggak* disiapkan dengan anggaran yang mencukupi kami khawatir *nggak* punya kemampuan lebih fleksibel dengan persoalan yang ada di masyarakat,"

tambahnya.

Dengan APBD perubahan, diharapkan OPD di lingkungan Pemkot Jogja yang lain juga sudah bisa melaksanakan program-program yang lebih selektif untuk dijalankan dan lebih fokus. "Karena tidak mungkin kami menyelenggarakan seluruh program yang kemarin dirancang di APBD murni. Kami berharap OPD lain bisa menyesuaikan (program yang selektif)," imbuhnya.

Sementara Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) mengatakan perpanjangan tanggap darurat jangan diartikan sebagai perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pembatasan kegiatan masyarakat.

Sebab hal ini berkaitan dengan komitmen atau kebijakan anggaran pemerintah daerah. "Selama belum bisa memprediksi kebijakan provinsi kami ikuti," kata HS.

HS menjelaskan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid-19 selama ini menggunakan biaya tak terduga. Dikarenakan situasi yang fluktuatif, akhir pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi. "Kami akan evaluasi terus," jelasnya.

Berkaitan dengan kegiatan perekonomian, pihaknya tidak pernah melakukan penutupan hotel dan resto. Pemkot, selalu mengingatkan agar pengelola usaha untuk tertib menerapkan protokol kesehatan. (wia/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005